



KORPORASI PETANI: MODEL KELEMBAGAAN AGRIBISNIS UNTUK KESEJAHTERAAN PETANI

Penulis:

Shinta Anggreany

Penyuluh Pertanian

Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan, Kementerian Pertanian RI

email: Shintaanggreany@pertanian.go.id

Di tengah upaya memperkuat ketahanan pangan nasional, petani Indonesia masih menghadapi tantangan seperti skala usaha kecil, akses pasar dan modal terbatas, serta posisi tawar yang lemah. Korporasi Petani hadir sebagai solusi berbasis kelembagaan agribisnis yang menawarkan kemandirian dan daya saing. Lantas, sejauh mana efektivitas model ini dalam menjawab persoalan struktural sektor pertanian?

Petani di Indonesia merupakan tulang punggung ketahanan pangan nasional, namun hingga kini masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat kesejahteraan mereka. Skala usaha yang kecil, keterbatasan akses pasar dan permodalan, serta ketergantungan pada perantara membuat posisi petani lemah dalam rantai nilai pertanian. Akibatnya, meskipun sektor ini memiliki potensi besar, petani sering kali kesulitan

mendapatkan keuntungan yang layak dari hasil pertaniannya.

Sebagai jawaban atas permasalahan ini, korporasi petani hadir sebagai model kelembagaan yang dapat memperkuat posisi petani dalam sistem agribisnis. Melalui korporasi, petani tidak lagi bekerja secara individu, tetapi tergabung dalam organisasi yang lebih terstruktur dan berbasis bisnis. Dengan sistem ini, mereka dapat mengakses modal yang lebih

besar, menerapkan teknologi modern, serta memiliki daya tawar yang lebih kuat dalam pemasaran hasil pertanian. Tidak hanya itu, korporasi petani juga mendorong kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, swasta, dan akademisi, untuk menciptakan sistem pertanian yang lebih berkelanjutan dan menguntungkan.

Beberapa contoh sukses telah membuktikan bahwa model ini dapat berjalan dengan baik.

Korporasi Induk Paser Jaya Bersama (KIPJB) di Kalimantan Timur telah membantu petani kelapa sawit mengelola usaha mereka dengan lebih profesional dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Sementara itu, PT Java Preanger Lestari Mandiri (PT JPLM) di Bandung berhasil memperluas pasar petani kopi hingga ke tingkat nasional dan internasional. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa dengan tata kelola yang baik, korporasi petani dapat menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat sektor pertanian nasional.

Namun, implementasi korporasi petani masih menghadapi berbagai tantangan. Minimnya pemahaman petani tentang manajemen usaha, kesulitan dalam mengakses pembiayaan, serta belum optimalnya dukungan kebijakan dan infrastruktur menjadi hambatan utama dalam pengembangannya. Tanpa solusi konkret, korporasi petani berisiko menjadi sekadar konsep tanpa dampak nyata di lapangan.

Tulisan ini akan membahas urgensi pengembangan korporasi petani, tantangan utama dalam implementasinya, serta strategi yang dapat dilakukan untuk

memastikan keberlanjutan model ini. Dengan pendekatan yang lebih terarah dan dukungan dari berbagai pihak, korporasi petani berpotensi menjadi pilar utama dalam menciptakan sistem pertanian yang lebih mandiri, berdaya saing, dan mampu menjawab tantangan pangan di masa depan.

KONSEP DAN KEBIJAKAN KORPORASI PETANI DI INDONESIA

Konsep “korporasi petani” muncul sebagai harapan baru bagi petani yang sudah terlalu lama berada di posisi lemah, menghadapi harga jual yang tidak stabil, kesulitan akses permodalan, keterbatasan teknologi, serta tekanan pasar yang semakin berat. Bukan sekadar kelompok tani atau koperasi biasa, tetapi model kelembagaan ekonomi petani yang membuat petani naik kelas, dari sekadar produsen menjadi pemilik saham dalam usaha pertanian yang terorganisir. Artinya, petani tidak hanya bekerja mengolah lahan, tapi juga punya hak atas keuntungan bisnis yang dijalankan secara kolektif. Dari produksi, distribusi, hingga pemasaran, semua dikelola dengan sistem yang lebih profesional dan berorientasi pasar.

Pemerintah sudah melihat potensi besar dari model ini. Sejak Permentan Nomor 18 Tahun 2018 terbit, upaya memperkuat korporasi petani terus digencarkan. Intinya, petani tidak boleh terus-menerus berada dalam skala ekonomi yang kecil. Mereka harus bergabung dalam ekosistem bisnis yang lebih besar melalui peningkatan *economic scale* agar punya daya tawar lebih kuat.

Konsep ini sebenarnya bukan barang baru. Sejak awal 2010-an, reformasi kelembagaan pertanian sudah mulai mengarah ke skema yang lebih kolektif. Pada 2018, *pilot project* Korporasi Petani mulai digerakkan, salah satunya di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Proyek ini menjadi ujian pertama bagaimana petani bisa dikelola dalam skala yang lebih luas, berbasis kawasan, dan mengendalikan sistem bisnis yang efisien. Program ini kemudian merambah ke daerah lain, termasuk lokasi-lokasi *Food Estate* yang fokus pada komoditas strategis seperti padi, jagung, kopi, kelapa, serta kombinasi hortikultura dan ternak.

Tak hanya berhenti di dalam negeri, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bahkan menengok langsung sistem *Corporatized*



(a) Padi sawah



(b) Tanaman okra

Gambar 1 Lahan padi sawah dan hortikultura di Karawang.
Sumber: Shinta Anggreany, 2023

Modern Rice Farming di Arkansas, Amerika Serikat. Di sana, ia menyaksikan bagaimana pertanian modern mengandalkan teknologi mutakhir: drone berbasis GPS, citra satelit, hingga otomatisasi pemupukan dan pemanenan. Hal ini menghasilkan produksi lebih efisien, tenaga kerja lebih sedikit, dan keuntungan lebih besar.

Indonesia berusaha mengadaptasi sistem ini dengan mengonsolidasikan lahan petani dalam korporasi berbasis kawasan. Petani yang tergabung mendapat akses teknologi canggih, permodalan lebih fleksibel, dan jalur pasar yang lebih luas. Pada akhirnya, tujuan utama model ini bukan sekadar meningkatkan produksi, tapi juga menjadikan petani sebagai pemain utama dalam rantai bisnis pertanian yang lebih kompetitif.

Publik banyak bertanya, apa bedanya “koperasi” dengan “korporasi petani”? Koperasi adalah elemen dalam korporasi petani. Koperasi merupakan pilihan yang lebih tepat karena merupakan entitas usaha berbadan hukum. Korporasi petani yang di dalamnya dapat berisi beberapa koperasi yang masing-masing menjalankan unit usaha tertentu, akan dapat bergerak dengan model bisnis yang lebih besar dan lebih agresif dalam membaca peluang pasar.

KEBERHASILAN MODEL KOPORASI PETANI: STUDI KASUS DI AMERIKA SERIKAT DAN INDONESIA

Korporasi petani bukan sekadar konsep di atas kertas. Di berbagai belahan dunia, model ini telah terbukti mampu memperkuat posisi ekonomi petani memperkuat daya saing produk pertanian. Dari Amerika Serikat hingga Indonesia, ada banyak *lesson learned* yang

menunjukkan bahwa kelembagaan petani berbasis bisnis modern dapat menjadi solusi nyata untuk pertanian yang lebih efisien, kompetitif, dan berkelanjutan.

Brantley Farming Co: Korporasi Petani Modern di Amerika Serikat

Salah satu contoh sukses korporasi petani di Amerika Serikat adalah Brantley Farming Co. di Arkansas, yang dikunjungi langsung oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Korporasi ini mengelola pertanian padi dalam skala besar dengan sistem *Corporatized Modern Rice Farming* yang terintegrasi dari hulu ke hilir—mulai dari pengolahan lahan, budidaya, panen, hingga pemasaran.

Keunggulan Brantley Farming Co. terletak pada pemanfaatan teknologi canggih, seperti Drone berbasis GPS untuk pemetaan dan pemupukan presisi, Citra satelit untuk pemantauan pertumbuhan tanaman, otomatisasi panen yang mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual.

Dampaknya? Efisiensi produksi meningkat, biaya operasional menurun, dan daya saing produk semakin kuat di pasar global.

Petani di dalam korporasi ini juga mendapat keuntungan lebih besar karena sistem kepemilikan berbasis saham, yang memungkinkan mereka memperoleh pendapatan dari dividen perusahaan, bukan hanya hasil panen. Model ini membuktikan bahwa dengan investasi yang tepat dan kelembagaan yang solid, pertanian dapat berkembang menjadi sektor bisnis yang lebih modern, mandiri, dan menguntungkan bagi petani.

KEBERHASILAN KOPORASI PETANI DI INDONESIA

Indonesia juga memiliki sejumlah contoh sukses dalam penerapan model korporasi petani. Beberapa studi kasus berikut menunjukkan bagaimana kelembagaan berbasis korporasi telah membawa perubahan signifikan bagi petani dan sektor pertanian nasional.

1. KIPJB: Korporasi Sawit yang Meningkatkan Kesejahteraan Petani di Kalimantan Timur

Sebelum adanya Koperasi Induk Paser Jaya Bersama (KIPJB) di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, petani sawit hanya bisa menjual



Gambar 2 Petani sedang berkerja kebun sawit.

Sumber: <https://sawitkita.id/> [diakses Februari 2025]

hasil panennya ke tengkulak atau perusahaan besar dengan harga yang rendah dan tidak stabil. Namun, sejak didirikan pada 2020, KIPJB mengubah nasib petani dengan membangun pabrik mini CPO (*Crude Palm Oil*) dan fasilitas pengolahan minyak goreng sawit.

Hasilnya pendapatan petani meningkat, karena mereka tidak hanya menjual Tandan Buah Segar (TBS), tetapi juga produk olahan dengan nilai tambah lebih tinggi. Harga jual lebih stabil, karena koperasi memiliki kendali lebih besar dalam rantai pasok. Pendampingan teknis membantu petani meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen. Keberhasilan KIPJB menunjukkan bahwa dengan kelembagaan yang kuat, petani sawit tidak lagi menjadi pihak yang hanya menerima harga pasar, tetapi bisa ikut menentukan nilai jual produknya sendiri.

2. PT JPLM: Kopi Java Preanger Menembus Pasar Global

Di sektor perkebunan kopi, PT Java Preanger Lestari Mandiri (PT JPLM) di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, menjadi bukti bahwa korporasi petani mampu membawa produk lokal ke kancah internasional.

Sebelum terbentuknya PT JPLM, petani kopi di daerah ini kesulitan menjual hasil panennya dengan harga yang layak karena masih bergantung pada perantara dan distributor besar. Namun, sejak resmi berdiri pada tahun 2020 dengan dukungan Kementerian Pertanian (Dirjen Perkebunan), situasi berubah drastis.

Bagaimana PT JPLM bisa sukses? Akses langsung ke pasar ekspor memungkinkan petani mendapatkan harga yang lebih tinggi dan kompetitif. Penerapan *Good Agricultural Practices* (GAP) & *Good Manufacturing Practices*

(GMP) meningkatkan kualitas produk. Hilirisasi produk membuat kopi Java Preanger menjadi kopi spesial unggulan Indonesia yang telah diakui dunia, bahkan meraih penghargaan di *Specialty Coffee Association of America* (SCAA) Expo 2016. Dengan model korporasi ini, petani tidak lagi sekadar produsen biji kopi, tetapi juga pemain utama dalam rantai bisnis kopi spesial Indonesia.

Keberhasilan korporasi petani di Indonesia dan Amerika Serikat memberikan pelajaran penting: pertanian modern tidak bisa hanya mengandalkan produksi besar-besaran, tetapi juga membutuhkan kelembagaan yang solid dan berbasis bisnis. Model korporasi memberikan petani akses lebih luas ke teknologi, pasar, dan modal, sehingga mereka bisa bersaing di level yang lebih tinggi. Jika strategi ini diperkuat dengan kebijakan yang berkelanjutan, korporasi petani bukan hanya sekadar program pemerintah, tetapi bisa menjadi motor utama transformasi pertanian nasional.

TANTANGAN UTAMA DALAM PENGEMBANGAN KORPORASI PETANI

Korporasi petani dianggap sebagai salah satu strategi yang dapat mendorong keberdayaan petani sekaligus memperkuat daya saing sektor pertanian nasional. Dengan model kelembagaan yang lebih terorganisir dan berbasis bisnis, konsep ini menawarkan kesempatan bagi petani untuk mendapatkan akses yang lebih luas terhadap modal, teknologi, serta pasar yang lebih kompetitif. Namun, dalam implementasinya, pengembangan korporasi petani masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Hambatan utama dalam pengembangannya tidak hanya terbatas pada aspek komunikasi dan koordinasi antarpemangku kepentingan, tetapi juga mencakup literasi bisnis petani, keterbatasan akses permodalan, regulasi yang masih belum kondusif, infrastruktur yang belum memadai, serta tantangan dalam penerapan digitalisasi di sektor pertanian.



Gambar 3 Areal lahan kebun kopi Java Preanger.

Sumber : <https://ameera.republika.co.id/berita/pnfnic440/kopi-java-preanger>
mahakarya a-cup-of-java [diakses Februari 2025]

1. Hambatan Komunikasi dan Keterlibatan Petani

Komunikasi yang efektif merupakan faktor kunci dalam kesuksesan korporasi petani. Namun, salah satu kendala utama yang dihadapi adalah rendahnya koordinasi antara petani dengan pemangku kepentingan. Dalam praktiknya, berbagai pihak seperti pemerintah pusat dan daerah, lembaga keuangan, serta mitra bisnis sering kali tidak memiliki mekanisme komunikasi yang efektif dengan petani. Hal ini menyebabkan aliran informasi mengenai kebijakan, pendanaan, serta peluang pasar tidak tersampaikan dengan baik.

Selain itu, keterlibatan petani dalam mekanisme kerja kolektif masih tergolong rendah. Mayoritas petani masih terbiasa dengan sistem usaha tani individu, sehingga menghadapi kesulitan dalam beradaptasi dengan konsep korporasi yang berbasis kelembagaan dan kerja sama. Minimnya pemanfaatan teknologi informasi dalam komunikasi organisasi juga memperburuk situasi, menyebabkan pengambilan keputusan menjadi lebih lambat dan koordinasi dalam rantai pasok kurang optimal.

2. Rendahnya Literasi Bisnis dan Manajemen Keuangan

Sebagian besar petani di Indonesia masih mengelola usaha mereka secara tradisional tanpa didukung oleh sistem pencatatan bisnis yang baik. Minimnya pemahaman tentang manajemen keuangan menjadi salah satu tantangan besar dalam pengelolaan korporasi petani. Banyak petani belum memahami bagaimana melakukan pencatatan arus kas, merencanakan investasi, atau menghitung biaya produksi dengan benar.

Di sisi lain, pemasaran hasil pertanian masih dilakukan dengan cara konvensional dan bergantung pada perantara, yang sering kali menyebabkan petani mendapatkan harga jual yang lebih rendah.

Kurangnya pengetahuan mengenai strategi pemasaran digital juga menjadi hambatan dalam memperluas akses pasar, padahal saat ini banyak platform digital yang dapat membantu petani menjangkau konsumen secara langsung. Jika literasi bisnis dan manajemen keuangan tidak segera ditingkatkan, maka banyak unit usaha dalam korporasi petani yang berisiko mengalami stagnasi atau bahkan kesulitan bertahan dalam jangka panjang.

3. Akses Permodalan yang Masih Terbatas

Modal merupakan faktor kunci dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing petani. Meskipun pemerintah telah menyediakan berbagai skema pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), masih banyak petani yang mengalami kendala dalam mengakses permodalan. Persyaratan administratif yang rumit dan terbatasnya kepemilikan aset yang dapat dijadikan jaminan sering kali menjadi penghalang utama bagi petani kecil untuk mendapatkan kredit usaha.

Di samping itu, masih banyak petani yang tidak memiliki akses terhadap informasi mengenai sumber pembiayaan yang tersedia. Minimnya sosialisasi terkait skema pendanaan dari pemerintah maupun sektor swasta membuat sebagian besar petani tidak mengetahui bahwa mereka sebenarnya bisa memperoleh modal usaha dengan cara yang lebih mudah dan fleksibel. Keterbatasan akses permodalan ini menyebabkan korporasi petani kesulitan untuk mengembangkan skala usahanya, mengadopsi teknologi baru, serta meningkatkan efisiensi produksi.

4. Regulasi yang Kompleks dan Kurangnya Insentif bagi Petani

Regulasi yang mendukung sangat diperlukan dalam pengembangan korporasi petani. Namun, dalam

praktiknya, masih terdapat berbagai hambatan birokrasi yang menyulitkan petani dalam membentuk dan menjalankan usaha berbasis korporasi. Proses legalitas untuk mendirikan badan usaha sering kali memakan waktu yang lama dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga menjadi beban tambahan bagi petani.

Selain itu, kebijakan perdagangan dan ekspor hasil pertanian masih memiliki banyak kendala, seperti ketentuan sertifikasi dan standarisasi produk yang belum sepenuhnya dipahami oleh petani. Di sisi lain, minimnya insentif dari pemerintah bagi petani yang tergabung dalam korporasi, baik dalam bentuk keringanan pajak, subsidi, maupun akses terhadap fasilitas produksi, turut menjadi hambatan dalam mempercepat pengembangan model ini.

5. Infrastruktur Pendukung yang Belum Memadai

Keberhasilan korporasi petani juga sangat bergantung pada infrastruktur yang mendukung rantai produksi dan distribusi hasil pertanian. Namun, di banyak daerah, masih terdapat keterbatasan dalam hal akses irigasi yang efisien, fasilitas penyimpanan hasil pertanian, serta jalur distribusi yang memadai.

Kurangnya sistem irigasi yang baik menyebabkan petani bergantung pada pola cuaca, meningkatkan risiko gagal panen, dan mengurangi produktivitas lahan. Selain itu, keterbatasan fasilitas pascapanen seperti gudang penyimpanan dan sistem pengolahan hasil pertanian mengakibatkan produk mudah rusak sebelum mencapai konsumen.

Infrastruktur transportasi yang belum optimal juga menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi petani yang berada di wilayah terpencil dengan akses pasar yang terbatas.

6. Tantangan dalam Adopsi Digitalisasi di Korporasi Petani

Digitalisasi menjadi salah satu elemen penting dalam modernisasi sektor pertanian. Namun, adopsi teknologi digital dalam sistem korporasi petani masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemanfaatan platform digital untuk pemasaran. Banyak petani masih bergantung pada tengkulak dan pasar tradisional, meskipun sudah tersedia berbagai platform *e-commerce* pertanian seperti TaniHub, SayurBox, dan Agromaret yang memungkinkan mereka menjual hasil panennya langsung ke konsumen atau mitra bisnis.

Selain itu, minimnya penggunaan aplikasi manajemen pertanian menjadi hambatan lain dalam meningkatkan efisiensi usaha tani. Padahal, aplikasi pencatatan digital dan monitoring pertanian berbasis data dapat membantu petani mengoptimalkan produksi serta membuat perencanaan keuangan yang lebih akurat.

Kendala lain yang dihadapi adalah keterbatasan infrastruktur digital, terutama akses internet di daerah pedesaan yang masih terbatas. Harga perangkat teknologi

yang relatif mahal dan rendahnya literasi digital di kalangan petani juga menjadi faktor yang menghambat proses digitalisasi di sektor pertanian.

Kurangnya integrasi teknologi modern seperti drone berbasis GPS dan sensor IoT dalam sistem pertanian presisi juga mengakibatkan rendahnya efisiensi penggunaan sumber daya, seperti pupuk, pestisida, dan air irigasi. Padahal, teknologi ini berpotensi untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan sektor pertanian.

SOLUSI DAN REKOMENDASI UNTUK PENGEMBANGAN KORPORASI PETANI

Korporasi petani memiliki potensi besar untuk membuat petani lebih berdaya saing dan memperkuat sektor pertanian nasional. Namun, berbagai tantangan yang telah diuraikan sebelumnya harus segera diatasi agar model ini dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Berikut adalah solusi dan rekomendasi yang dapat diterapkan untuk menjawab permasalahan dalam pengembangan korporasi petani khususnya di Indonesia.

1. Meningkatkan Efektivitas Komunikasi dan Keterlibatan Petani

Agar korporasi petani dapat berjalan dengan baik, komunikasi dan koordinasi antara petani dengan pemangku kepentingan harus diperkuat. Upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan cara membangun sistem komunikasi yang lebih terstruktur dengan memanfaatkan teknologi digital seperti aplikasi pesan instan (WhatsApp, Telegram) dan platform khusus untuk komunikasi pertanian. Kemudian mengadakan forum rutin antara petani dan pemangku kepentingan seperti pemerintah, lembaga keuangan, serta mitra bisnis untuk memastikan koordinasi yang lebih baik dalam kebijakan dan program pendampingan. Diperlukan juga peran penyuluh pertanian sebagai fasilitator komunikasi, dengan memberikan pelatihan tambahan kepada mereka mengenai komunikasi kelembagaan dan penggunaan teknologi informasi. Agar lebih mudah diterima maka dibutuhkan juga peran kepemimpinan lokal dalam korporasi petani, dengan melibatkan tokoh masyarakat, ketua kelompok tani, dan Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) untuk membangun kepercayaan dan partisipasi aktif petani. Sehingga melalui sistem komunikasi yang lebih efektif, petani akan lebih mudah beradaptasi dengan model bisnis kolektif dan dapat meningkatkan keterlibatan mereka dalam pengelolaan korporasi petani.

2. Meningkatkan Literasi Bisnis dan Manajemen Keuangan Petani

Agar petani dapat menjalankan korporasi secara profesional, mereka perlu memiliki pemahaman yang baik tentang aspek bisnis dan keuangan. Solusi yang dapat diterapkan antara lain adalah dengan cara mengintegrasikan program pelatihan literasi bisnis dalam pendampingan petani,

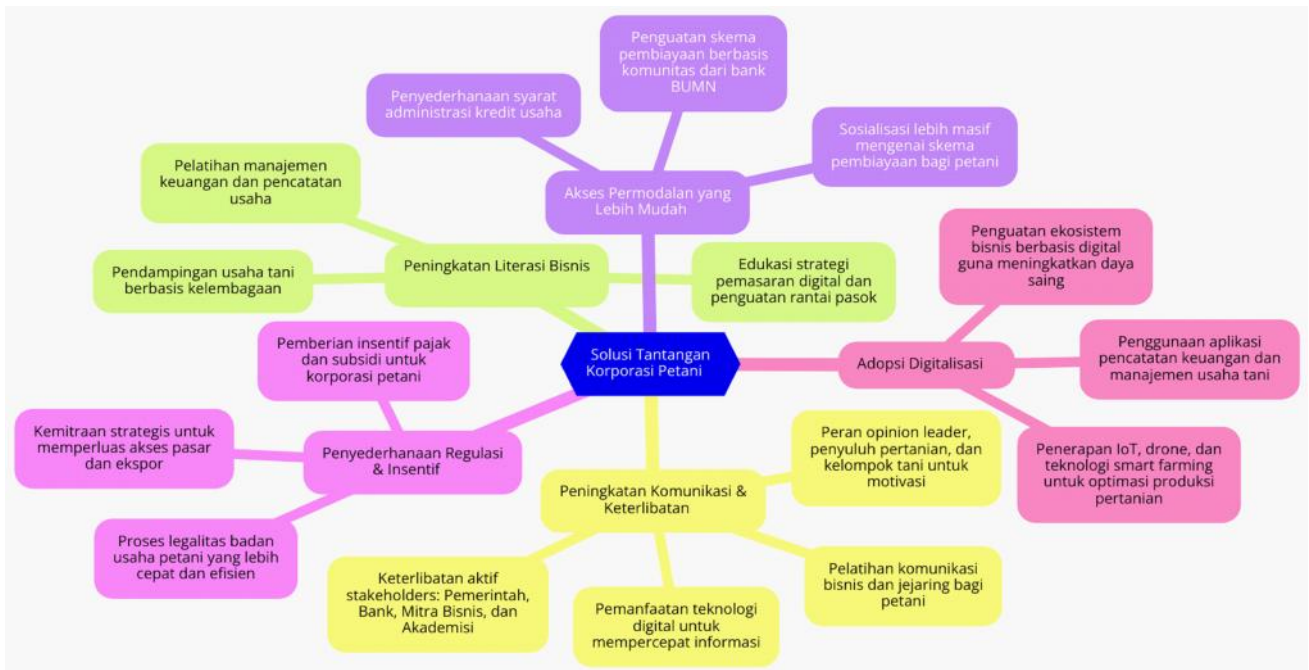


(a) Contoh beras premium hasil olahan RMU

(b) Mesin RMU kapasitas 3 ton gabah/jam

Gambar 4 RMU pada Korporasi petani di Kecamatan Jayakarta Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Sumber: Shinta Anggreany, 2022



Gambar 5 Mindmap Strategi Solutif dalam Pengembangan Korporasi Petani di Indonesia.
Sumber: Sinta Anggreany, 2025.

termasuk pelatihan pencatatan keuangan, perencanaan usaha, dan strategi pemasaran berbasis digital. Perlu juga pengembangan modul pembelajaran berbasis digital dan *offline* yang mudah dipahami oleh petani, dengan dukungan dari akademisi dan praktisi agribisnis. Selanjutnya perlu untuk mendorong penggunaan aplikasi pencatatan keuangan sederhana seperti buku kas atau aplikasi serupa yang dapat membantu petani dalam mengelola arus kas dan mencatat transaksi secara sistematis. Di samping itu peran pendampingan juga harus di dorong seperti pada pemasaran digital, agar petani dapat memanfaatkan platform *e-commerce* seperti TaniHub, SayurBox, dan Agromaret untuk memperluas akses pasar. Peningkatan literasi bisnis dan manajemen keuangan, akan mendorong petani lebih siap dalam mengelola usaha berbasis korporasi dan meningkatkan daya saing produk mereka di pasar.

3. Mempermudah Akses Permodalan bagi Petani

Akses terhadap permodalan merupakan kunci utama dalam mendukung pengembangan korporasi petani. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pembiayaan antara lain menyederhanakan proses administrasi dalam pengajuan kredit usaha rakyat (KUR) sehingga lebih mudah diakses oleh petani kecil. Selanjutnya perlu mengembangkan skema pembiayaan berbasis komunitas, seperti dana bergulir atau koperasi simpan pinjam yang dikelola secara kolektif dalam korporasi petani. Setelahnya perlu untuk mendorong kemitraan antara bank dan fintech agribisnis, agar petani dapat memperoleh akses pembiayaan yang lebih fleksibel dan sesuai dengan siklus usaha tani. Kemudian diperlukan upaya dalam meningkatkan sosialisasi mengenai berbagai opsi pembiayaan, dengan memanfaatkan penyuluh pertanian

dan media digital agar informasi mengenai program pendanaan lebih mudah diakses oleh petani. Melalui berbagai solusi tersebut akan mempermudah akses dan fleksibilitas permodalan, sehingga petani dapat meningkatkan produktivitas dan memperluas skala usahanya dalam korporasi petani.

4. Menyederhanakan Regulasi dan Meningkatkan Insentif bagi Petani

Korporasi petani memerlukan dukungan kebijakan yang kondusif agar dapat berkembang dengan baik. Rekomendasi yang dapat diterapkan seperti menyederhanakan proses pendirian badan usaha petani, sehingga lebih cepat dan tidak membebani petani dengan biaya administrasi yang tinggi. Kemudian melalui peningkatan insentif bagi petani yang tergabung dalam korporasi, misalnya dalam bentuk keringanan pajak, subsidi input produksi, serta kemudahan akses fasilitas penyimpanan dan distribusi. Lebih jauh bisa melalui

revisi regulasi perdagangan ekspor bagi korporasi petani agar lebih mudah menjual produknya ke pasar internasional dengan prosedur yang lebih sederhana dan transparan. Selanjutnya dapat membentuk lembaga pendukung yang khusus menangani kelembagaan korporasi petani, yang bertugas membantu legalisasi, sertifikasi produk, serta memberikan pendampingan regulasi kepada petani. Oleh karena itu, melalui dukungan kebijakan yang lebih berpihak pada petani akan mempercepat perkembangan korporasi petani dan meningkatkan kesejahteraan mereka dalam jangka panjang.

5. Pembangunan Infrastruktur Pendukung yang Lebih Merata

Infrastruktur pertanian yang baik merupakan faktor penting dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani. Solusi yang dapat diterapkan seperti dengan meningkatkan investasi dalam pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, agar petani tidak terlalu bergantung pada pola cuaca dalam proses produksi. Dapat juga dengan membangun fasilitas penyimpanan dan pascapanen yang memadai, seperti gudang penyimpanan dan rumah pengolahan hasil pertanian untuk menjaga kualitas produk sebelum dipasarkan. Selanjutnya memperbaiki akses transportasi dan jalur distribusi, terutama di daerah terpencil, agar

produk pertanian lebih mudah dan cepat sampai ke pasar dengan biaya logistik yang lebih rendah. Perlu juga pengembangan pusat logistik pertanian berbasis korporasi, yang dapat berfungsi sebagai titik pengumpulan dan distribusi produk hasil pertanian dalam skala besar. Melalui infrastruktur yang lebih baik, biaya produksi dapat ditekan, hasil panen lebih terjaga, dan daya saing produk pertanian dapat meningkat.

6. Mempercepat Adopsi Digitalisasi dalam Korporasi Petani

Digitalisasi dapat menjadi pendorong utama dalam modernisasi sektor pertanian. Untuk meningkatkan adopsi teknologi digital dalam korporasi petani, langkah-langkah yang dapat dilakukan meliputi peningkatan akses internet di wilayah pertanian, dengan memperluas jaringan internet di desa-desa serta menyediakan paket internet bersubsidi bagi petani. Selanjutnya mendorong penggunaan platform digital untuk pemasaran, melalui pelatihan dan pendampingan intensif agar petani lebih terbiasa menggunakan *e-commerce* pertanian. Selanjutnya juga dapat diperkuat dengan penyediaan aplikasi pencatatan dan monitoring pertanian yang lebih sederhana, agar mudah digunakan oleh petani tanpa memerlukan pelatihan yang kompleks. Dapat pula dengan pengembangan

skema insentif bagi petani yang menerapkan teknologi modern, seperti penggunaan drone untuk penyemprotan pupuk dan sensor IoT untuk pemantauan kondisi lahan. Terakhir dengan memperkuat peran penyuluh pertanian dalam edukasi digital, agar mereka dapat membantu petani memahami manfaat teknologi dan cara penggunaannya dalam usaha tani. Melalui percepatan adopsi digitalisasi maka korporasi petani dapat lebih efisien, transparan, dan kompetitif di pasar global, sehingga meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat daya saing pertanian nasional, serta mewujudkan ketahanan pangan yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Dari pemaparan ini membawa kita pada satu kesimpulan bahwa pengembangan korporasi petani membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif dan kolaboratif. Ke depan, korporasi petani memiliki prospek besar sebagai model kelembagaan pertanian yang berkelanjutan, dengan dukungan dari berbagai pihak (Multi-stakeholders) termasuk pemerintah, sektor swasta, lembaga keuangan, akademisi, dan petani itu sendiri. Jika diterapkan dengan strategi yang tepat, model ini tidak hanya akan memperkuat posisi ekonomi petani, tetapi juga menjadi fondasi utama bagi ketahanan pangan nasional dan daya saing pertanian Indonesia di pasar global.